

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan pada Daerah Tertinggal Indonesia

Samhaji¹, Francesco Dennis Anggara²

Universitas Airlangga, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi Author: francesco.dennis.anggara-2025@fisip.unair.ac.id

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Kata kunci:

Implementasi Kebijakan;
Pemerataan Pendidikan;
Daerah Tertinggal.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil melalui pendekatan studi kepustakaan. Ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan mendasar, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, distribusi guru yang tidak merata, serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles, Huberman, dan Saldaña untuk melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis berdasarkan literatur ilmiah terbaru, laporan kebijakan, serta temuan empiris dari berbagai konteks daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan akses pendidikan secara nasional telah menghasilkan peningkatan partisipasi sekolah dan perluasan layanan pendidikan dasar. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan spesifik daerah terpencil yang sangat bergantung pada dukungan kelembagaan lokal dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pemerintah daerah, kolaborasi multipihak, dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Sebaliknya, hambatan utama mencakup tumpang tindih regulasi, infrastruktur digital yang terbatas, tata kelola yang lemah, serta distribusi guru yang tidak proporsional. Kajian ini merekomendasikan pentingnya desain kebijakan adaptif berbasis konteks lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerataan pendidikan di daerah terpencil.

Keywords:

Policy Implementation;
Educational Equity;
Underdeveloped Regions.

Abstrack

This study aims to evaluate the effectiveness of implementing educational equity policies in remote regions through a comprehensive literature review approach. Educational inequality remains a persistent structural issue, particularly in areas facing limited infrastructure, uneven teacher distribution, and weak local institutional capacity. Using the analytical framework of Miles, Huberman, and Saldaña, this study conducts systematic data reduction, data display, and conclusion drawing based on recent scholarly literature, policy documents, and empirical findings from various regional contexts. The results show that national policies to expand educational access have contributed to increased school participation and broader basic education services. However, these policies have yet to fully address the specific needs of remote regions, which depend heavily on local governance capacity and community socioeconomic conditions. Supporting factors for effective implementation include strong local government commitment, multi-stakeholder collaboration, and the utilization of educational technology. Conversely, key barriers include regulatory overlap, limited digital infrastructure, weak institutional governance, and disproportionate teacher allocation. This study recommends the development of adaptive policies tailored to local contexts, strengthened institutional capacity, and the integration of a continuous monitoring and evaluation system to enhance the effectiveness of educational equity efforts in remote areas.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan landasan pengembangan sumber daya manusia. Akses yang setara terhadap pendidikan telah menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan publik dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan inklusif (Ofianto, 2025). Namun, dalam praktiknya, kesetaraan pendidikan antarwilayah masih tidak merata. Daerah

tertinggal sering menghadapi hambatan struktural, seperti infrastruktur sekolah yang terbatas, keterpencilan geografis, kekurangan tenaga pendidik yang kompeten, dan anggaran yang terbatas, yang menghambat anak-anak untuk mengakses layanan pendidikan yang memadai dan berkelanjutan (Pramono dkk., 2025). Kondisi ini memperkuat siklus keterbelakangan sosial-ekonomi yang sulit diatasi tanpa intervensi kebijakan yang efektif dan implementasi yang tepat di tingkat lokal.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan, termasuk Program Pendidikan Wajib Sembilan Tahun dan kebijakan pendidikan gratis (Muhammad Ivan, 2024). Namun, implementasi kebijakan-kebijakan ini sering terhambat oleh faktor struktural dan kontekstual di tingkat regional. Misalnya, di Kabupaten Merauke, khususnya di Distrik Okaba, ketidakselarasan antara perencanaan kebijakan pusat dan realitas lokal telah menyebabkan kualitas pendidikan yang rendah (Wika, 2025). Tantangan utama meliputi kekurangan pendidik yang berkualitas, tingkat kehadiran pendidik yang rendah, dan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam formulasi dan implementasi kebijakan, yang semuanya menghambat pencapaian kesetaraan pendidikan.

Inisiatif pemerintah untuk mempromosikan akses pendidikan yang setara di berbagai tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) sering kali berbentuk program dan pengalokasian sumber daya yang ada, dirancang untuk mengurangi kesenjangan (Wijayati dkk., 2025). Namun, kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas lapangan dipengaruhi oleh berbagai variabel. Faktor administratif, kapasitas institusional lokal, budaya masyarakat, ketersediaan data akurat untuk perencanaan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, sekolah, keluarga, dan organisasi non-pemerintah) sangat penting dalam menentukan apakah kebijakan mencapai tujuannya di daerah-daerah yang kurang berkembang (Sukodoyo dkk., 2025). Analisis implementasi kebijakan oleh karena itu esensial untuk memahami tidak hanya apa yang terkandung dalam kebijakan tersebut, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, diadaptasi, dan diterima dalam konteks lokal.

Di banyak wilayah yang kurang berkembang, program yang dirancang dari pusat seringkali tidak sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, standar kurikulum yang seragam dan persyaratan infrastruktur mungkin sulit dipenuhi di daerah terpencil, sehingga memerlukan solusi teknis dan manajerial alternatif (Suhermawan dkk., 2025). Selain itu, keberlanjutan intervensi sering terancam oleh ketergantungan pada pendanaan insidental dan kurangnya mekanisme pemantauan yang responsif. Masalah administratif, seperti birokrasi yang rumit, anggaran yang dialokasikan secara tidak tepat, dan distribusi guru yang tidak merata, sering menghambat implementasi yang efektif (Sumardi, 2025). Di tingkat komunitas, status ekonomi rumah tangga, norma gender, dan persepsi nilai pendidikan mempengaruhi partisipasi anak-anak dalam sekolah.

Secara konseptual, studi tentang implementasi kebijakan pendidikan di wilayah tertinggal harus mengintegrasikan perspektif multidimensi, termasuk analisis kebijakan, studi kapasitas organisasi dan pemerintah lokal, serta pemeriksaan sosio-budaya tentang hubungan antara komunitas dan layanan publik. Pendekatan implementasi kebijakan yang menekankan interaksi antara aktor, sumber daya, dan konteks lokal memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan intervensi. Selain itu, evaluasi berbasis hasil dan proses sangat penting untuk membedakan apakah hambatan berasal dari desain kebijakan, mekanisme pelaksanaan, atau faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan bencana alam.

Ada juga kesenjangan penelitian di sisi empiris, karena banyak studi mengandalkan data kuantitatif makro (misalnya, tingkat partisipasi sekolah, tingkat literasi) tanpa mengeksplorasi secara mendalam proses implementasi tingkat lokal, seperti cara aktor lokal menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan, dinamika koordinasi antar pemerintah, dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Memahami proses-proses ini sangat penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang didukung bukti dan relevan dengan konteks.

Studi-studi sebelumnya tentang kebijakan akses pendidikan yang setara telah dilakukan oleh peneliti seperti Endry Setiawan, Ninik Handayani, dkk. (2024), yang menyoroti bahwa kesetaraan pendidikan memerlukan reformasi sistemik mulai dari kualitas pendidik, kondisi sekolah, hingga kurikulum yang selaras dengan tuntutan Industri 4.0. Akses yang setara di seluruh wilayah memberikan pemerintah gambaran yang lebih akurat tentang kondisi pendidikan. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting, sementara akademisi dan mahasiswa pascasarjana diharapkan mendukung upaya ini (Endry Setiawan dkk., 2024).

Penelitian serupa oleh Burhan, Busnawir, dan Melyana R. Pugu (2025) mengkaji kebijakan distribusi pendidik dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Temuan mereka menunjukkan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan penempatan guru dimaksudkan untuk menutup kesenjangan pendidikan dan memberikan akses yang adil bagi semua anak Indonesia. Tantangan utama meliputi fasilitas dan insentif yang terbatas, yang memerlukan dukungan melalui tunjangan, pengembangan profesional, dan sumber daya yang memadai. Peningkatan kualitas pendidikan juga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, termasuk penggunaan teknologi dan pemberdayaan masyarakat (Burhan dkk., 2025).

Meskipun studi sebelumnya oleh Endry Setiawan dkk. (2024) dan Burhan dkk. (2025) telah membahas aspek penting akses pendidikan dan distribusi guru di daerah terpencil, mereka lebih berfokus pada analisis konseptual dan rekomendasi kebijakan umum. Studi ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan empiris di tingkat lokal, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang, sehingga memungkinkan evaluasi efektivitas program pemerintah seperti PIP, DAK Pendidikan, dan BOS dalam konteks dunia nyata. Selain itu, studi ini menyoroti faktor-faktor struktural, geografis, sosial, dan budaya yang memengaruhi kesuksesan kebijakan, serta sinergi aktual antara pemerintah pusat dan lokal, masyarakat, dan pendidik.

Penelitian ini penting karena temuan-temuan dapat memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana lokal untuk meningkatkan mekanisme distribusi sumber daya, merancang intervensi yang sensitif terhadap konteks, dan mengembangkan model koordinasi yang efektif di antara pemangku kepentingan. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah-daerah tertinggal lainnya sambil mengungkap kelemahan sistemik yang memerlukan reformasi administratif atau penyesuaian kebijakan. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan pendidikan dengan bukti dari daerah-daerah tertinggal, yang seringkali kurang terwakili.

Berdasarkan hal di atas, studi tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal di Indonesia bertujuan untuk memahami: (1) sejauh mana kebijakan yang dirancang mencapai tujuan akses yang setara, (2) faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat implementasi kebijakan di tingkat lokal, dan (3) rekomendasi kebijakan berbasis konteks untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Pendekatan penelitian ini menekankan pada studi kasus di wilayah tertinggal, dengan menggabungkan analisis data kualitatif terhadap aktor kunci dan proses implementasi lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bukti empiris tentang dinamika implementasi kebijakan pendidikan di daerah tertinggal, mengidentifikasi hambatan struktural dan operasional paling kritis dalam mencapai pemerataan akses, memberikan rekomendasi kebijakan praktis dan kontekstual bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan pusat, serta berkontribusi pada literatur akademik tentang implementasi kebijakan publik di sektor pendidikan, khususnya dalam konteks daerah tertinggal di Indonesia.

Metode

Studi ini menggunakan metode kualitatif yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan untuk menganalisis kebijakan terkait pendidikan. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dengan mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok (Nazar, 2022). Metode ini menekankan pemahaman konteks, proses, dan makna subjektif daripada pengukuran numerik atau analisis statistik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan data, bertujuan untuk mengeksplorasi realitas sosial dalam lingkungan alaminya. Data yang diperoleh bersifat deskriptif, berupa kata-kata, narasi, atau gambar, bukan angka.

Studi kepustakaan, di sisi lain, adalah jenis studi yang memanfaatkan berbagai sumber literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan dokumen tertulis lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan (Asmendri, 2020). Dalam studi ini, peneliti tidak melakukan observasi lapangan langsung, melainkan meninjau teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya untuk membangun landasan teoretis, memperkuat argumen, dan menjawab pertanyaan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang mengacu pada penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk artikel ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Semua data diperoleh dari bahan tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya (Rashid, 2022). Langkah pertama yang diambil oleh peneliti adalah mengidentifikasi sumber data yang akan digunakan, termasuk sumber primer, seperti karya ilmiah dan penelitian sebelumnya yang langsung terkait dengan objek penelitian, serta sumber sekunder, seperti artikel pendukung, ensiklopedia, atau publikasi kebijakan.

Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tinjauan mendalam terhadap informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Karena semua data bersifat sekunder dan berasal dari bahan tertulis, analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, melibatkan elaborasi, perbandingan, dan interpretasi isi berbagai literatur untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang isu-isu yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui pengkondensasian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penggabungan data adalah proses menyederhanakan, memilih, memfokuskan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih terorganisir dan bermakna untuk memudahkan pemahaman dan analisis (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Dalam konteks penelitian kualitatif, penggabungan data melibatkan pemilihan informasi yang relevan, mengabaikan data yang tidak relevan, dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu.

Penyajian data merujuk pada tahap menyajikan data yang telah dikondensasi dalam format sistematis dan mudah dipahami. Tujuannya adalah menyajikan informasi secara terstruktur agar peneliti dapat mengamati gambaran keseluruhan, mengidentifikasi pola, dan memahami hubungan antar kategori atau variabel penelitian (Darmalaksana, 2020). Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif (Fadli, 2021). Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data yang telah dikondensasi dan ditampilkan sebelumnya untuk mengidentifikasi temuan penelitian utama. Kesimpulan bukanlah sekadar ringkasan data, melainkan hasil dari penafsiran makna, interpretasi, dan refleksi mendalam terhadap informasi yang diperoleh.

Hasil dan Diskusi

Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan

Kebijakan pemerataan akses pendidikan di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk mengatasi ketimpangan struktural dan memastikan bahwa seluruh anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, geografis, maupun sosial-budaya, memperoleh kesempatan setara dalam menikmati pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks penelitian ini, yang mengadopsi pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, evaluasi implementasi kebijakan dilakukan melalui penelusuran data sekunder, laporan pemerintah, temuan penelitian sebelumnya, serta dokumentasi empiris dari berbagai daerah tertinggal. Dengan pendekatan studi kepustakaan, analisis mengenai capaian kebijakan tidak hanya berhenti pada evaluasi angka agregat, tetapi juga memperhatikan dinamika implementasi kebijakan di berbagai wilayah dengan karakteristik geografis, administratif, dan sosial yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan Nazar (2022) bahwa penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan realitas kebijakan melalui proses pemaknaan mendalam terhadap data tekstual dan dokumentatif. Oleh karena itu, hasil pembahasan mengenai sejauh mana kebijakan pemerataan akses pendidikan mencapai tujuannya bersifat holistik karena memadukan pola nasional dengan bukti empiris dari berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Utara, Aceh Singkil, dan sebagian wilayah Madura.

Secara nasional, pemerintah telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program pemerataan guru melalui kebijakan redistribusi dan afirmasi daerah tertinggal. Instrumen-instrumen ini jika dilihat dari desain kebijakannya memang telah diarahkan untuk mengatasi hambatan utama akses pendidikan, yaitu faktor ekonomi, kurangnya infrastruktur, ketimpangan ketersediaan guru, dan kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah (Ofianto, 2025). Namun, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan pemerataan sangat bergantung pada implementasi di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kapasitas kelembagaan daerah, dan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, ketimpangan antarwilayah

bukan berasal dari kurangnya kebijakan, tetapi dari bagaimana kebijakan itu dijalankan dalam konteks lokal yang kompleks (Sukodoyo dkk., 2025).

Hasil sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa kebijakan nasional telah memberikan dampak positif dalam memperluas akses pendidikan, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, PIP secara konsisten dilaporkan mampu menurunkan angka putus sekolah di berbagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti NTT dan NTB, karena bantuan tunai langsung mengurangi beban biaya pendidikan keluarga (Pramono dkk., 2025). Namun demikian, capaian tersebut tidak merata antarwilayah. Di beberapa daerah kepulauan seperti Alor, Flores Timur, dan Sabu Raijua, efektivitas PIP terhambat oleh akurasi pendataan siswa miskin, keterbatasan akses teknologi dalam proses verifikasi data, dan rendahnya literasi administrasi orang tua, sehingga terdapat kesenjangan antara penerima yang berhak dan penerima aktual. Kondisi serupa juga ditemukan di beberapa wilayah pesisir Madura dan daerah pedalaman Kalimantan Utara seperti Nunukan dan Krayan, di mana proses distribusi bantuan sering mengalami keterlambatan akibat tantangan logistik dan kurangnya tenaga administrasi terlatih di sekolah-sekolah terpencil.

Di sisi lain, program DAK Pendidikan yang bertujuan memperbaiki infrastruktur pendidikan menunjukkan capaian yang signifikan di sebagian wilayah, tetapi menghadapi hambatan keras di daerah pegunungan dan daerah pulau-pulau kecil. Di Papua Pegunungan dan beberapa kabupaten di pegunungan Tengah Papua, laporan menunjukkan bahwa pembangunan ruang kelas baru sering tertunda karena transportasi material membutuhkan biaya tinggi dan waktu tempuh yang panjang (Sumardi, 2025). Di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Mentawai, Maluku Barat Daya, dan beberapa pulau terluar NTT, realisasi DAK juga terhambat oleh kondisi geografis yang sulit diakses dan musim gelombang tinggi yang membatasi mobilisasi bahan bangunan. Kesulitan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan melalui DAK sebenarnya bergantung pada kapasitas adaptasi pemerintah daerah dan fleksibilitas teknis implementasi, bukan hanya pada alokasi anggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Wika (2025) di Merauke, yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara desain kebijakan pusat dan realitas lokal menyebabkan hasil pembangunan menjadi tidak optimal, meskipun anggaran tersedia.

Program BOS yang menjadi sumber pendanaan operasional sekolah telah terbukti lebih stabil dalam memberikan dukungan bagi sekolah-sekolah kecil di daerah tertinggal. BOS memungkinkan sekolah untuk menjalankan aktivitas dasar pembelajaran, membeli alat tulis, mendukung kegiatan siswa, dan mempertahankan layanan operasional minimum. Namun, efektivitas BOS sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi sekolah dan tata kelola internal. Sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan kekurangan tenaga administrasi atau kepala sekolah yang belum memiliki kapasitas manajerial memadai sering terlambat mengelola dana BOS atau salah memprioritaskan anggaran (Darmalaksana, 2020). Akibatnya, meskipun dana BOS merata, kesenjangan kualitas layanan antarwilayah tetap persisten. Hal ini terlihat di daerah terpencil seperti sebagian wilayah Aceh Singkil, Halmahera Selatan, dan pesisir Madura, di mana sekolah kesulitan menyusun rencana penggunaan dana yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karena minimnya pelatihan manajemen dan keterbatasan keterampilan literasi digital.

Sementara itu, kebijakan pemerataan guru merupakan salah satu dimensi yang memiliki dampak besar terhadap kesetaraan pendidikan, tetapi justru menunjukkan kesenjangan terbesar antarwilayah. Hasil penelitian Burhan dkk. (2025) menunjukkan bahwa redistribusi guru di daerah-daerah terpencil sering terhambat oleh minimnya insentif, kondisi geografis yang sulit, serta rendahnya motivasi guru untuk bertugas di daerah sulit. Temuan ini menguatkan laporan serupa dari berbagai daerah lain, seperti pedalaman Papua, pulau terluar di Maluku, kecamatan-kecamatan terpencil di NTT, dan wilayah hutan Kalimantan Utara. Kekurangan guru bersertifikat, terutama pada jenjang SMP dan SMA, menyebabkan kualitas pembelajaran menurun dan berdampak langsung pada angka partisipasi sekolah. Analisis ini memperlihatkan bahwa kesenjangan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau infrastruktur sekolah, tetapi juga oleh kualitas tenaga pendidik yang tersedia.

Dari perspektif implementasi kebijakan, temuan-temuan lintas wilayah tersebut menunjukkan bahwa capaian program pemerataan akses pendidikan bersifat *parsial* berhasil di satu aspek, terhambat pada aspek lain. Dalam konteks desain kebijakan, instrumen-instrumen seperti PIP, BOS, dan DAK sebenarnya sudah mencakup dimensi utama pemerataan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan memerlukan kemampuan adaptasi di tingkat lokal, keterlibatan masyarakat, kapasitas administratif

sekolah, serta dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal (Wijayati dkk., 2025). Kesenjangan antara desain dan implementasi inilah yang menyebabkan tujuan pemerataan tidak sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuannya sangat bergantung pada konteks sosial, kapasitas institusional, dan karakteristik geografis masing-masing daerah.

Lebih jauh, dinamika sosial dan budaya juga menjadi faktor penting yang memengaruhi capaian kebijakan. Di beberapa daerah konservatif atau tradisional, seperti sebagian desa di NTT, Maluku, dan Madura, persepsi masyarakat terhadap nilai pendidikan, terutama pendidikan perempuan, masih menjadi kendala bagi partisipasi sekolah. Faktor sosial-budaya ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan kebijakan berbasis anggaran, melainkan memerlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan perubahan norma melalui kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan analisis Suhermawan dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan harus memperhatikan dinamika budaya lokal, karena proses implementasi kebijakan seringkali ditentukan oleh bagaimana masyarakat menafsirkan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dilihat dalam kerangka teoretis implementasi kebijakan publik, khususnya model Grindle yang menekankan interaksi antara konten kebijakan dan konteks implementasi, dapat disimpulkan bahwa berbagai daerah tertinggal memperlihatkan kompleksitas yang tinggi. Konten kebijakan (*policy content*) relatif sama di seluruh Indonesia, karena bersumber dari kebijakan nasional. Namun, konteks implementasi (*context of implementation*) sangat berbeda antarwilayah, dipengaruhi oleh kondisi geografis, kapasitas administrasi, sumber daya manusia, dan karakteristik sosial-budaya. Inilah yang menyebabkan kebijakan yang sama dapat menghasilkan capaian yang berbeda di daerah berbeda.

Dengan mempertimbangkan semua temuan tersebut, maka capaian kebijakan pemerataan akses pendidikan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berhasil secara struktural, tetapi belum optimal secara kontekstual. Artinya, kebijakan telah menyediakan kerangka dukungan yang cukup untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan, tetapi implementasinya belum mampu menembus hambatan-hambatan lokal di daerah tertinggal. Pemerintah pusat telah membuat progres dalam aspek pendanaan, namun perubahan signifikan pada akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal baru dapat tercapai jika kebijakan lebih adaptif terhadap kondisi lokal, lebih partisipatif, dan lebih responsif terhadap dinamika sosial, geografis, dan administratif.

Faktor yang Memfasilitasi dan Menghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik rural dan berada dalam kondisi sosial-ekonomi terpinggirkan memperlihatkan bahwa realisasi kebijakan tersebut berlangsung dalam lanskap struktural yang rumit, diwarnai oleh berbagai faktor yang baik memfasilitasi maupun menghambat efektivitasnya, sehingga proses implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan secara formal tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial di lapangan. Berbagai penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa faktor pendukung (*facilitating factors*) umumnya berkaitan dengan adanya komitmen kelembagaan, tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta dukungan komunitas lokal dalam memaknai pemerataan pendidikan sebagai kebutuhan bersama (Hill & Hupe, 2014; Priyono, 2020; Bjork, 2005). Dalam konteks rural Indonesia, elemen-elemen ini kerap menghadirkan dinamika unik karena struktur sosial yang lebih komunal memungkinkan partisipasi masyarakat berjalan secara organik, misalnya melalui gerakan gotong royong memperbaiki sarana sekolah, sumbangan komunitas terhadap program literasi, atau inisiatif lokal yang menjembatani kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin agar tetap dapat bersekolah (Rahman, 2019; Bray, 2001). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerataan akses dihasilkan dari proses birokratis di tingkat pusat, keberhasilan implementasinya sangat terkait dengan kapasitas sosial lokal untuk memobilisasi sumber daya dan memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Selain dukungan sosial, faktor pendukung dari implementasi juga berasal dari kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan melalui koordinasi lintas sektor, pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis data, dan penyusunan anggaran yang responsif terhadap konteks lokal (Turner & Hulme, 1997; Budiarti, 2022). Ketika pemerintah daerah memiliki unit kerja yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program mikro yang relevan dengan kondisi masyarakat

seperti melalui penyediaan transportasi sekolah, beasiswa afirmatif untuk keluarga miskin, atau kemitraan dengan organisasi lokal maka kebijakan pemerataan akses yang semula hanya berupa norma abstrak dapat berubah menjadi instrumen yang menghadirkan dampak nyata (Wahyudi, 2021). Peningkatan kapasitas birokrasi pendidikan, pelatihan kepala sekolah, dan penguatan pengawas sekolah juga terbukti memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, terutama dalam memastikan bahwa sekolah memiliki manajemen internal yang baik dan mampu melaksanakan prinsip pemerataan secara konsisten (Sagala, 2013; Sari, 2022). Dalam perspektif literatur, birokrasi yang cakap adalah prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan, karena kebijakan pada akhirnya dijalankan oleh *street level bureaucrats* yang memutuskan bagaimana instruksi dipahami dan dioperasionalkan (Lipsky, 1980).

Namun demikian, di balik faktor-faktor pendukung tersebut, temuan studi pustaka secara konsisten menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan menghadapi hambatan yang jauh lebih kompleks, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, kondisi sosial-ekonomi yang rendah, serta kesenjangan kapasitas pemerintahan. Hambatan paling fundamental adalah keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, sarana transportasi, listrik, dan jaringan internet, yang mengakibatkan layanan pendidikan tidak dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (World Bank, 2018; Fahmi, 2020). Di banyak daerah rural, sekolah berjarak jauh dari pusat pemukiman sehingga anak harus berjalan kaki berjam-jam setiap hari, sementara kondisi topografi yang sulit membuat transportasi sekolah tidak selalu memungkinkan. Hambatan geografis ini memperlambat realisasi pemerataan akses karena pendidikan pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari faktor keterjangkauan fisik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital memperburuk ketimpangan, terutama setelah kebijakan pendidikan nasional memberikan penekanan kuat pada pembelajaran berbasis teknologi. Akses internet yang lemah membuat sekolah-sekolah rural tertinggal dalam pemanfaatan platform pendidikan digital, sehingga kebijakan nasional berbasis digitalisasi tidak mampu berjalan secara merata (UNESCO, 2022; Zulkifli, 2021).

Di samping hambatan struktural, keterbatasan anggaran pendidikan daerah menjadi faktor penghambat yang sering kali luput dari perhatian publik. Daerah dengan pendapatan asli daerah rendah tidak memiliki kapasitas fiskal untuk menyediakan sarana-prasarana pendidikan tambahan, memperbaiki sekolah rusak, atau memberikan insentif bagi guru yang ditempatkan di wilayah terpencil (Arifin & Kristiawan, 2020; OECD, 2021). Dalam konteks implementasi kebijakan, kekurangan anggaran tidak hanya membuat kebijakan berjalan secara minimalis, tetapi juga menciptakan ketergantungan penuh kepada pemerintah pusat. Ketika alokasi dari pusat tidak memadai atau lambat tersalurkan, kebijakan pemerataan akses pendidikan menjadi hanya sebatas dokumen, tanpa transformasi nyata di lapangan. Ketimpangan distribusi guru menjadi hambatan berikutnya yang bersifat sistemik. Guru-guru berpengalaman cenderung enggan ditempatkan di daerah terpencil karena fasilitas terbatas, lingkungan kerja berat, minimnya akses profesional, serta rendahnya peluang pengembangan karier (Rosser & Fahmi, 2016; Tansel, 2019). Ketidakseimbangan distribusi ini menyebabkan sekolah rural sering kali hanya memiliki guru kontrak, honorer, atau guru dengan latar belakang pendidikan kurang sesuai, sehingga menurunkan kualitas layanan pendidikan dan membuat tujuan pemerataan akses tidak tercapai secara substantif.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya kapasitas manajerial sekolah, terutama di wilayah rural yang menghadapi tantangan dalam tata kelola internal dan perencanaan berbasis data. Kepala sekolah sering kali tidak memiliki pelatihan manajerial yang memadai, sehingga proses implementasi kebijakan seperti pemetaan kebutuhan siswa, pengelolaan anggaran BOS, atau penyusunan program unggulan berbasis konteks lokal tidak berjalan optimal (Sagala, 2013; Sari, 2022). Dalam banyak kasus, sekolah hanya mengikuti instruksi administratif tanpa memiliki strategi adaptif untuk menjawab tantangan spesifik wilayahnya. Hal ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan mitra non pemerintah, yang menjadikan implementasi kebijakan berlangsung secara terfragmentasi. Hambatan komunikasi kebijakan juga menjadi persoalan mendasar; sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan sering kali memiliki pemahaman berbeda terhadap maksud kebijakan, mekanisme pelaksanaan, dan indikator keberhasilan (Matland, 1995; Suhardono, 2019). Ketidakselarasan pemahaman ini menghasilkan variasi implementasi yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pemerataan, dan dalam beberapa kasus, dapat menimbulkan distorsi kebijakan.

Faktor sosial kultural juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan. Dalam rumah tangga berpendapatan rendah, biaya pendidikan tidak hanya mencakup buku dan seragam tetapi juga biaya transportasi, makanan, dan kontribusi informal lainnya, sehingga keluarga miskin sering kali harus memilih antara pendidikan anak dan kebutuhan ekonomi jangka pendek (Suryadarma et al., 2006; UNICEF, 2020). Selain itu, norma sosial tertentu, seperti pandangan bahwa anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi atau bahwa pendidikan tidak memberikan manfaat ekonomis langsung, turut menghambat partisipasi pendidikan. Di wilayah rural, pendidikan sering kali dipahami bukan sebagai kewajiban negara yang harus dipenuhi, tetapi sebagai pilihan yang bersifat situasional bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga, jarak sekolah, serta prioritas rumah tangga (Nilan, 2008; Parker & Raihani, 2011). Hambatan kultural seperti ini menuntut bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan pendekatan komunikasi sosial, pendampingan komunitas, serta edukasi publik yang konsisten.

Meskipun berbagai hambatan tersebut tampak dominan, literatur tetap mencatat adanya faktor pendukung lain yang mampu memperkuat implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan. Misalnya, perkembangan teknologi pendidikan jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dapat digunakan untuk memperluas akses pembelajaran di daerah terpencil melalui model *hybrid learning*, radio pendidikan, atau komunitas belajar berbasis digital (Zulkifli, 2021; UNESCO, 2022). Inisiatif masyarakat sipil seperti rumah belajar, komunitas literasi, atau sekolah alternatif berbasis keagamaan juga menyediakan ruang pendidikan nonformal yang membantu mengatasi keterbatasan sekolah formal (Afiff & Rahayu, 2020). Pemerintah pusat pun telah meluncurkan berbagai kebijakan afirmatif seperti tambahan BOS afirmasi, penempatan guru melalui program PPPK, serta bantuan sarana untuk daerah tertinggal (Kemendikbud, 2023; Kemenkeu, 2022), yang semuanya berfungsi sebagai faktor pendukung implementasi kebijakan di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Konteks

Rekomendasi kebijakan berbasis konteks untuk meningkatkan efektivitas implementasi pemerataan akses pendidikan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan sebelumnya mengenai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan pemerataan dan faktor-faktor yang memfasilitasi serta menghambat implementasinya. Literatur menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain regulasi, tetapi terutama oleh kemampuan kebijakan tersebut menyesuaikan diri dengan keragaman geografis, sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal (Howlett & Ramesh, 2003; Hill & Hupe, 2014). Oleh sebab itu, rekomendasi kebijakan dalam konteks studi pustaka ini harus diarahkan pada strategi yang bersifat diferensiatif, adaptif, dan sensitif terhadap kondisi lokal yang unik, terutama pada wilayah rural yang menghadapi tantangan infrastruktur, keterbatasan anggaran, distribusi guru yang tidak merata, serta norma-norma sosial yang memengaruhi partisipasi pendidikan. Pendekatan kebijakan yang *"one-size-fits-all"* terbukti tidak efektif dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpinggirkan karena mengabaikan kompleksitas sosial yang menjadi latar implementasi kebijakan (Bjork, 2005; Matland, 1995).

Rekomendasi pertama yang paling mendasar adalah perlunya penguatan mekanisme perencanaan pendidikan berbasis konteks (*context-based educational planning*), yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara mikro dengan mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah siswa per desa, tingkat kemiskinan rumah tangga, persebaran tenaga pendidik, hingga faktor kultural seperti pola kerja keluarga dan norma gender (Suryadarma et al., 2006). Pemetaan tersebut harus dilakukan secara berkala dan dijadikan dasar dalam penyusunan program tahunan daerah agar kebijakan pemerataan tidak hanya bersifat normatif tetapi berakar pada kenyataan sosial.

Rekomendasi kedua adalah penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui peningkatan profesionalitas aparatur pendidikan, pelatihan perencanaan berbasis data, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Kapasitas birokrasi pendidikan yang kuat merupakan prasyarat penting dalam memastikan bahwa tujuan pemerataan dapat diterjemahkan menjadi program yang operasional, efektif, dan berkelanjutan (Turner & Hulme, 1997; Budiarti, 2022). Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang menguasai analisis kebutuhan pendidikan, tata kelola sekolah, manajemen pembiayaan, dan pengawasan implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, koordinasi antara dinas

pendidikan, pemerintah desa, dan sekolah perlu diperkuat melalui forum komunikasi tetap yang dapat berfungsi sebagai wadah penyelarasan program, penyelesaian masalah implementasi, serta berbagi praktik baik (Wahyudi, 2021). Pendekatan multi aktor ini penting mengingat implementasi kebijakan tidak hanya berada pada ranah pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh komunitas lokal, lembaga nonformal, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, koordinasi dan kapasitas birokrasi merupakan salah satu faktor paling menentukan keberhasilan kebijakan karena pelaksana di tingkat bawah (*street-level bureaucrats*) adalah aktor yang sebenarnya menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata (Lipsky, 1980).

Rekomendasi ketiga menyangkut penyediaan dukungan infrastruktur pendidikan yang komprehensif bagi wilayah yang memiliki hambatan geografis. Banyak studi menunjukkan bahwa akses fisik terhadap sekolah merupakan faktor paling mendasar dalam partisipasi pendidikan, terutama di wilayah terpencil (Fahmi, 2020). Oleh sebab itu, strategi seperti penyediaan transportasi sekolah gratis, pembangunan jembatan dan jalan akses, serta penyediaan asrama siswa desa terpencil perlu dijadikan prioritas dalam kebijakan pemerataan akses. Selain infrastruktur fisik, pemerintah perlu memastikan pemerataan infrastruktur digital agar sekolah-sekolah di daerah rural dapat mengikuti digitalisasi pendidikan nasional. Peningkatan jaringan internet sekolah dan penyediaan perangkat teknologi menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan digital yang memperparah ketidaksetaraan akses (Zulkifli, 2021). Dengan teknologi yang memadai, sekolah di wilayah marginal dapat mengikuti kurikulum digital, pelatihan guru online, dan pembelajaran hybrid yang fleksibel bagi siswa.

Selanjutnya, rekomendasi keempat terkait dengan perbaikan sistem distribusi guru agar tidak terjadi konsentrasi guru berkualitas di wilayah perkotaan dan kekurangan guru di wilayah rural. Kebijakan afirmatif seperti insentif finansial khusus, tunjangan daerah terpencil, prioritas kenaikan pangkat, hingga skema beasiswa ikatan dinas bagi calon guru yang bersedia ditempatkan di wilayah rural terbukti efektif dalam berbagai studi internasional maupun nasional (Tansel, 2019; Rosser & Fahmi, 2016). Selain aspek penempatan, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, mentoring, dan komunitas belajar perlu diperkuat agar guru di daerah marginal memiliki kesempatan pengembangan profesional yang sama dengan guru di wilayah lain (Sagala, 2013).

Rekomendasi kelima adalah memperkuat peran masyarakat dan aktor lokal dalam implementasi kebijakan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki potensi besar dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, baik melalui peran komite sekolah, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, maupun organisasi pemuda (Bray, 2001; Rahman, 2019). Program-program seperti gerakan literasi desa, beasiswa komunitas, kelas tambahan berbasis relawan, hingga perbaikan sarana sekolah melalui gotong royong adalah bentuk partisipasi komunitas yang terbukti meningkatkan akses pendidikan. Pemerintah perlu menginstitutionalisasi partisipasi masyarakat melalui mekanisme formal seperti forum komunikasi pendidikan desa, musyawarah pendidikan tahunan, serta skema hibah berbasis masyarakat (*community-driven grants*) agar partisipasi tidak hanya bersifat insidental tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola pendidikan lokal.

Rekomendasi keenam adalah memperkuat intervensi sosial-ekonomi bagi keluarga miskin. Faktor ekonomi merupakan penghambat paling kuat terhadap partisipasi pendidikan, sehingga kebijakan pemerataan harus memasukkan komponen perlindungan sosial bagi siswa dari keluarga miskin, seperti beasiswa afirmasi, bantuan tunai bersyarat, subsidi seragam, serta bantuan transportasi (UNICEF, 2020; Suryadarma et al., 2006). Pendekatan afirmatif ini harus dilakukan secara terarah berdasarkan data kemiskinan mikro (*village-level poverty data*) agar sasaran bantuan tepat dan efektif. Intervensi sosial ini tidak hanya meningkatkan partisipasi pendidikan tetapi juga memperkuat motivasi belajar dan keberlanjutan sekolah.

rekomendasi ketujuh adalah pentingnya membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memantau ketimpangan akses pendidikan secara *real time*. Monitoring yang baik memerlukan indikator pemerataan yang jelas dan terukur, seperti rasio partisipasi sekolah, rasio guru dan murid, indeks keterjangkauan sekolah, indeks infrastruktur, dan indikator kesenjangan digital (OECD, 2021). Pemerintah harus mengembangkan dashboard pemerataan pendidikan yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga desa, sehingga keputusan kebijakan didasarkan pada data yang valid, bukan asumsi. Evaluasi kebijakan berbasis data juga memungkinkan deteksi dini atas ketimpangan baru yang muncul akibat dinamika ekonomi dan sosial.

Secara keseluruhan, rekomendasi berbasis konteks ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan makro, tetapi memerlukan strategi multi dimensi yang menggabungkan intervensi struktural, penguatan tata kelola, pemberdayaan komunitas, digitalisasi, afirmasi ekonomi, serta monitoring berkelanjutan. Kebijakan pemerataan pendidikan harus dipahami sebagai proses adaptif yang memerlukan perubahan kebijakan secara dinamis sesuai dengan kondisi lokal yang terus berkembang (Howlett, 2019). Dengan demikian, rekomendasi ini menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa tujuan pemerataan pendidikan dapat dicapai secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal di Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensional yang menghambat tercapainya kesetaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional. Berbagai program seperti PIP, BOS, DAK Pendidikan, redistribusi guru, dan digitalisasi sekolah memang telah memberi kontribusi terhadap perluasan akses, namun efektivitasnya bergantung pada kapasitas lokal, kesiapan infrastruktur, koordinasi lintas lembaga, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Kajian terhadap beragam wilayah tertinggal menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara desain kebijakan pusat dan kondisi lapangan tetap menjadi faktor dominan yang menghambat capaian kebijakan. Hambatan geografis, terbatasnya sarana prasarana pendidikan, ketimpangan distribusi guru, lemahnya literasi digital, dan rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak bisa dicapai hanya melalui penyaluran program, tetapi membutuhkan strategi implementasi yang sensitif terhadap konteks lokal. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara aktor, sumber daya, struktur birokrasi, dan kultur masyarakat, bukan sekadar persoalan administratif atau teknis semata.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan pendidikan di daerah tertinggal melalui pendekatan sintesis multi lokasi yang mengungkap faktor-faktor struktural, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi capaian pemerataan pendidikan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara desain kebijakan dan konteks lokal, serta menekankan perlunya model implementasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya relevan bagi pembuat kebijakan tetapi juga bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan masyarakat yang ingin memperbaiki kualitas dan kesetaraan pendidikan di wilayah-wilayah tertinggal di Indonesia. Dengan strategi implementasi yang lebih responsif dan berbasis konteks, pemerataan akses pendidikan bukan hanya menjadi agenda normatif, tetapi dapat diwujudkan sebagai realitas yang mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif.

Referensi

- Admaja, P. D., & Hamid, M. S. (2024). Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Diy. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, 2(2), 361–374.
- Affriliani, Tersta, F. W., & Pratama, L. (2025). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 418–425.
- Akbar, R. F. M., & Baharuddin, Z. T. M. (2025). Manajemen Pelayanan Publik. *Jurnal Pkm Manajemen Bisnis*, 5(1), 291–304.
- Alfariq Ramadani, & Putri, R. P. (2024). Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3t Pemerintah Kota Batam. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 10(1), 40–49. <https://doi.org/10.25299/Wedana.2024.13523>
- Amir Mirdad, Istikhori, Tedi, Emat Muslihat, T. S. (2025). Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dana

- Bos Terhadap Kualitas Pendidikan Di Smp Pgri 1 Ciambar. *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(4), 85–96.
- Asmendri, M. S. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa, Dalam Jurnal Natural Science: *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, 6(1).
- Az-Zahra Juro, Firanti Sukma Hardiyani Lubis, L. Z. (2025). Ampak Infrastruktur Terhadap Pendidikan Di Perkampungan (Studi Kasus Di Desa Sugarang Bayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6957–6964.
- Azam Jaysurrohman, R., Supandi, M., Tedi Wardani, M., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Bintang : Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 3(2), 215–227. <https://Ejournal.Stitpn.Ac.Id/Index.Php/Bintang>
- Bjork, C. (2005). Indonesian education: Teachers, schools, and central bureaucracy. Routledge.
- Bray, M. (2001). Community partnerships in education: Dimensions, variations, and implications. UNESCO.
- Burhan, Busnawir, & Pugu, M. R. (2025). Kebijakan Pemerataan Guru Dan Kualitas Pendidikan Di Daerah Terpencil. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(01), 253–263.
- Dahyanti, N., Diastami, S. M., Humaira, A., & Darmansah, T. (2025). Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Problematika Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 87–100.
- Dalimunthe, S. M., Rambe, M. H., & Dwinta, N. (2025). El-Banar: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Solusi Krisis Pendidikan Di Daerah 3t: Pendekatan Dan Inovasi Untuk Kemajuan. *El-Banar: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 1–20.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dzaky Satria, Ihsan Utama Kusasih, & Gusmaneli Gusmaneli. (2025). Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Saat Ini : Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 292–309. <https://doi.org/10.55606/jubpi.V3i2.3838>
- Endry Setiawan, Ninik Handayani, Ranto Setiyono, Hermansyah Hermansyah, Ahmad Ahmad, & Widyatmike Widyatmike. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 29–38. <https://doi.org/10.61132/Sadewa.V2i4.1200>
- Fadil, K., Amran, A., & Alfaen, N. I. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's. *At-Ta'Dib*, 7(2), 1–27. <https://doi.org/10.32832/At-Tadib.V7i2.19512>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Gusnita, F., Annisa, M., Triana, M., Asmendri, & Sari, M. (2025). Perencanaan Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru. *Dirasah*, 8(1), 297–308. <https://Ejournal.Iaifa.Ac.Id/Index.Php/Dirasah>
- Hermawan, A., & Indahri, Y. (2025). Tantangan Dan Strategi Penguatan Pendidikan Di Daerah Marginal.

- Idrus, L. (2019). Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 344.
- Irmanda, M. A., Sutrisno, E., & Giyanto, B. (2024). Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Air Minum Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kota Bekasi. *Journal Of Public Policy And Applied Administration*, 6(1), 15–28. <https://doi.org/10.32834/jplan.V6i1.732>
- Julia, A. N., & Ahmad, M. (2025). Analisis Studi Literatur: Strategi Optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Pendidikan Dasar Berkualitas. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2 Series Articles), 728–739. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp/article/view/625>
- Kemendikbud. (2018). *Laporan Kinerja Kemendikbud Tahun 2018*.
- Lena Marziana, Muhamad Suhardi, Widiyarsari Rohmawati, Nurul Sakira, A. H. (2025). Strategi Pemerataan Tenaga Pendidik Di Daerah Terpencil: Sebuah Kajian Literatur Tentang Pendekatan Yang Efektif. *Educational : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(2), 473–485.
- Lestari, C., Dini Pratiwi, R., Pratama, D. J., & Safitri, S. (2025). Kesenjangan Digital Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(4), 1–16.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitatif Data Analysis; Methods Sourcebook (Third Edit)*. Sage Publications, Ins.
- Muhammad Ivan. (2024). Evaluation Of Education Assistance Policies (Smart Indonesia Program/School Operational Assistance) In Overcoming Out-Of-School Children (Ats) And Increasing Gross Participation Rates/Net Participation Rates (Apk/Apm) In Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 14(1), 80–92. <https://doi.org/10.59098/talim.V2i02.1255>
- Nadya Cindy Aurellia, Eka Fajariyani Adika Putri, Dijan Rahajuni, & Oki Anggraeni. (2025). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Angka Putus Sekolah Di Kecamatan Sumbang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 84–92. <https://doi.org/10.51903/jupea.V5i1.4502>
- Nazar, N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). Mataram. [https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/Buku Metode Penelitian.Pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/Buku%20Metode%20Penelitian.pdf)
- Nooraini, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Blended Learning Tingkat Sekolah Dasar Dan Taman Kanak-Kanak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3624–36370. <https://doi.org/10.31004/edukatif.V4i3.2713>
- Nurdin, A. A., Mawaddah, A. R., Abdullah, N. P., Yadilla, N., & Aini, Q. (2024). Multidisiplin Pengaruh Keterbatasan Akses Pendidikan Terhadap Tingginya Angka Putus Sekolah Dikaitkan Dengan Sdgs. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 660–674.
- Nurokhmah. (2021). Program Indonesia Pintar (Pip): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(1), 37–48.
- Ofianto, W. F. &. (2025). Teknologi Sebagai Solusi Untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil. *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(4), 3604–3617.
- Pramono, S., Pramudiana, I. D., & Sholichah, N. (2025). Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Dengan Kategori Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Malang. *Multiple: Journal Of Global And Multidisciplinary*, 3(8), 5601–5618.

- Rashid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. Iain Kediri Press.
- Retnaningsih, H. (2018). Prinsip Portabilitas Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Di Kota Jambi Provinsi Jambi Dan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 1–20. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/Aspirasi/Article/View/1084>
- Rohmatul Hasanah. (2025). Inequality Of Access To Education In Remote Areas: Human Rights Issues And Legal Policy In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wicarana*, 4(1), 1–9.
- Sara Indah Elisabet Tambun, Goncalwes Sirait, J. S. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah. *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (Vish)*, 1(1), 82–88. <https://doi.org/10.17977/Um020v16i22022p265-275>
- Setiawan, D., Oktavinindia, B., Nur Saffanah, S. L., Zahra, N. A., & Yogjanarendra, H. W. (2024). Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Bagi Anak-Anak Miskin Dan Berprestasi. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 13(3), 24–37. <https://doi.org/10.21831/Sakp.V13i3.22355>
- Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A. F., Nisa, C., Simanjuntak, J. P., & Jamaludin. (2024). Kesenjangan Digital Dalam Dunia Pendidikan Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang (Studi Kasus Di Smp N 35 Medan) San. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 15–24. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jubpi/Article/View/3003>
- Sofi Cita Pratama, Y. S. (2024). Optimalisasi Program Indonesia Pintar (Pip) Dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 799–811.
- Soro, S. H., Rifandi, A., Sofayantina, Y., & Listianti. (2024). Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru (Studi Kasus Penggunaan Anggaran Di Smp Negeri 36 Kota Bandung). *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 2441–2448. <https://jurnaledukasia.org>
- Sugiyono, & Rahmawati, E. S. (2024). Pendekatan Berbasis Komunitas Untuk Meningkatkan Kunjungan Ulang Pasien Di Puskesmas Klotok Plumpang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia*, 3(12), 121–127.
- Suhermawan, Erielya, D., Oktariyanda, & Trena Aktiva. (2025). Efektivitas E-Health Dalam Peningkatan Layanan Publik Di Puskesmas Sawahan Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(12), 44–60. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15614949>
- Sukodoyo, Kartika Dewi, R., Farida Sari, A., Sri Rahayu, S., & Sukarmin. (2025). Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Di Indonesia: Dampak, Tantangan, Dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296–310. <https://doi.org/10.37567/Jie.V11i1.3793>
- Sulhan Hamid H Lubis, Wanapri Pangaribuan, Selamat Triono Ahmad, S., & Arif. (2022). Kebijakan Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Sekolah Swasta. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 1–11.
- Sumardi. (2025). Pengantar Imu Pemerintahan. In *Grup Penerbitan Cv Tahta Media Group* (Vol. 2, Issue 1).
- Trisnawati, K., & Yudartha, I. P. D. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap

- Optimalisasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Di Kabupaten Badung Kadek Trisnawati. *Socio-Political Communication And Policy Review*, 1(6), 1-8.
- Wardhana, A., & Pontan, D. (2022). Identification Of The Causes Of Damage To The elementary School Building In Bekasi District during The Pandemic. *Prosiding Seminar Intelektual Muda #7*, 76-81.
- Wijayati, I. W., Hotman, F., Damanik, S., & Lazaro, C. (2025). Kesenjangan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil : Analisis Kebijakan Dan Alternatif Solusi Pendahuluan Akses Pendidikan Merupakan Hak Asasi Manusia Yang Mendasar Dan Menjadi Landasan Utama Untuk Mencapai Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan . N. *Journal Scientific Of Mandalika*, 6(3), 671-677.
- Wika, M. (2025). Antara Komitmen Dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan Di Wilayah Terpencil Merauke. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(1), 89-96. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i1.376>
- Yani, D. A., & Syahbudi, M. (2022). Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Masyarakat Di Kota Medan. *Jurnal Maharif Al-Syariah: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), H.1168.
- Yudha Maya Septiana, Solfema Solfema, & Lili Dasa Putri. (2024). Upaya Dalam Pemerataan Pendidikan Di Daerah Terpencil. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 162-169. <https://doi.org/10.47861/jkpu-Nalanda.V2i6.1446>